

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdussalam dan Adri Desasfiryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PTIK.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada media Group.

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta: UI Press.

Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta : Media Presindo.

CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Harbani Pasolong, 2008, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: CV Alfabeta.

Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Knut D. Asplanud, Suparman Marzuki editor, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, Yogyakarta: PUSHAM UII.

Kusumohamidjojo Budiono, 2004, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil* Jakarta: Grasindo.

Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Jakarta : Toko Gunung Agung.

M. Tahir Azhary, 1995, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon dkk., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ridwan H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara - Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Shalia Indonesia.

Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni.

Said Zainal Abidin, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta :Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soewarno Handyaningrat, 1994, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : Haji Masagung.

Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Bulan Bintang.

William N. Dunn, 2000, Pengantar Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

b. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80).

c. Internet/Jurnal Ilmiah

Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, Jakarta.

Angkasa, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Viktimologi, (Makalah disampaikan dalam Training for Trainees on Victimology and Victim Assistance Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Bogor.

Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No.4/Th.V/April 1999, Fakultas Tarumanegara, Jakarta.

Chandy Afrizal, 2017, Jurnal Ilmiah *“Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung”*, Bandar Lampung.

Data Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/28%2015:08:51.405193/1496/persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi-2015---2016.html>, diakses pada 27 Februari 2020.

Dhimas Ginanjar, 2018, *Mengerikan, Dalam Dua Tahun Penculikan Anak Naik Dua Kali Lipat*, dilansir dalam, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/02/2018/mengerikan-dalam-dua-tahun-penculikan-anak-naik-dua-kali-lipat/>, diakses pada 30 Oktober 2019.

Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf, diakses pada 05 November 2019.

Elina Aryanti, 2012, Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran), Jurnal Online Mahasiswa FISIP Volume 1 No.2-Oktober 2014.

Eman Sulaiman, 2013, Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.

Hari Harjanto Setiawan, 2017, Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, Sosio Informa Vol. 3, No. 01, Januari - April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial

Ida Ayu Iswariyati, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar”, Volume 06, No. 03, Mei 2018, Kertha Negara : Journal Ilmu Huku, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, 2018, Profil Anak Indonesia

- 2018, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
<https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/25/1587/profil-anak-indonesia-tahun-2018> diakses pada 20 April 2020.
- Konvensi, 1998, Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II No. 2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan.
- Marjanne Termorshuizen, 2004, The Concept Rule of Law, dalam “JENTERA Jurnal Hukum”, Edisi 3 tahun II, Jakarta.
- Mick Olaf Monintja, 2014, Kedudukan Akta Kelahiran dalam Hukum Administrasi Negara dan Implikasinya terhadap Aspek Keperdataan Seseorang, Jakarta : Fakultas Ilmu Hukum Program PascaSarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia .
- Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2017, Pedoman Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Jakarta :
<http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Quick-Win-Pedoman-Penyusunan-Naskah-Akademik-Rancangan-Undang-Undang-1507775513.pdf> diakses 30 April 2020.
- Soedjati Djiwantono, 1955, Setengah Abad Negara Pancasila, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Tim Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan, “ Rumusan Rapat Koordinasi Kependudukan Pengkajian Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan, Jakarta, 29 Mei 2002.
- Tria Febrina, Implementasi Kebijakan Kependudukan (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil Tahun 2013), Jurnal Online Mahasiswa Fisip Vol.2 No.1-Februari 2015
- Untung Sri Hardjanto, 2019, “*Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang*”, Administrative Law & Governance Journal.

Volume 2 Issue 2, June 2019: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Zumrotul Abidin, 2015, Mensos Nyatakan 43 Juta Anak Belum Berakte Kelahiran,
<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2015/Mensos-Nyatakan-43-Juta-Anak-Belum-Berakte-Kelahiran/>, diakses pada 27 Februari 2020.

